

TINJAUAN MULTIDIMENSIONAL RELASI YAYASAN (PENDIDIKAN) KANISIUS DAN KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

MULTIDIMENSIONAL REVIEW OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE KANISIUS (EDUCATIONAL) FOUNDATION AND THE ARCHDIOCESE OF SEMARANG

Amadea Prajna Putra Mahardika

*Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta,
dionisiusamadea@gmail.com*

Dikirimkan: 8 November 2024; Diterima: 8 Januari 2025

DOI: <https://doi.org/10.24071/si.v24i2.10358>

ABSTRACT

*This paper explores the multifaceted relationship between Yayasan (Pendidikan) Kanisius (YK) and the Archdiocese of Semarang (KAS), highlighting operational and relational challenges within a Catholic educational framework. The method used in this research was a literature study combined with empirical experience and interviews. Based on the author's experience with YK Cabang Surakarta, the study outlines the foundational mission of YK to provide Catholic education, facing financial instability, declining enrollment, and limited support from KAS. The strained partnership was analyzed through Javanese social philosophy and Michel Foucault's power dynamics, noting that hierarchical structures and inconsistent communication from KAS hinder YK's effectiveness. The author advocates for synodality through strengthened dialogue and mutual understanding, informed by Ignatian spirituality and Avery Dulles' model of the "servant Church." This approach calls for creative fidelity, where YK and KAS collaborate in decision-making to better address educational and social challenges. The study references theological insights from *Evangelii Gaudium* and *Fratelli Tutti*, urging KAS to actively support YK's mission, especially to serve marginalized communities. In conclusion, the paper emphasizes a "servant church" model to transform the KAS-YK relationship into a partnership that honors both educational and ecclesial commitments. Improved communication and resource-sharing are essential for a sustainable impact, fostering a mission-centered community that aligns with the Church's social teaching and the needs of Indonesia's diverse society.*

Keywords: *Yayasan Kanisius, Keuskupan Agung Semarang, creative fidelity, sentire cum ecclesia, synodality, servant Church*

ABSTRAK

Makalah ini mengeksplorasi hubungan multidimensional antara Yayasan (Pendidikan) Kanisius (YK) dan Keuskupan Agung Semarang (KAS), dengan menyoroti tantangan operasional dan relasional dalam kerangka pendidikan Katolik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka digabungkan dengan pengalaman empiris serta wawancara. Berdasarkan pengalaman penulis di YK Cabang Surakarta, studi ini menguraikan misi dasar



YK untuk menyediakan pendidikan Katolik yang dihadapkan pada ketidakstabilan finansial, penurunan jumlah murid, dan dukungan terbatas dari KAS. Kemitraan yang tegang ini dianalisis melalui filsafat sosial Jawa dan dinamika kekuasaan Michel Foucault, menunjukkan bahwa struktur hierarkis dan komunikasi yang inkonsisten dari KAS menghambat efektivitas YK. Penulis menganjurkan "sinodalitas" melalui penguatan dialog dan saling pengertian, dengan landasan spiritualitas Ignasian dan model "Gereja yang melayani" dari Avery Dulles. Pendekatan ini menyerukan ketaatan kreatif, di mana YK dan KAS berkolaborasi dalam pengambilan keputusan untuk lebih mengatasi tantangan pendidikan dan sosial. Studi ini mengacu pada wawasan teologis dari *Evangelii Gaudium* dan *Fratelli Tutti*, serta mendesak KAS untuk secara aktif mendukung misi YK, terutama dalam melayani komunitas terpinggirkan. Singkatnya, makalah ini menekankan model "Gereja yang melayani" untuk mentransformasi hubungan KAS-YK menjadi kemitraan yang menghormati komitmen pendidikan dan gerejawi. Perbaikan komunikasi dan pembagian sumber daya sangat penting untuk dampak yang berkelanjutan, menciptakan komunitas berorientasi misi yang selaras dengan ajaran sosial Gereja dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam.

Kata kunci: Yayasan Kanisius, Keuskupan Agung Semarang, ketaatan kreatif, kesepahaman dengan Gereja, sinodalitas, Gereja yang melayani

1. PENDAHULUAN

Hubungan antara yayasan keagamaan dan otoritas keuskupan memegang peranan penting dalam efektivitas dan keberlanjutan lembaga pendidikan Katolik, terutama dalam konteks sosial dan agama Indonesia yang beragam. Yayasan (Pendidikan) Kanisius (YK), yang beroperasi di bawah Keuskupan Agung Semarang (KAS), mencerminkan tantangan dan peluang dalam dinamika ini. Secara historis, YK telah berperan sebagai institusi penting di Jawa Tengah, dengan komitmen menyediakan pendidikan Katolik di daerah perkotaan dan pedesaan, terinspirasi oleh visi spiritual dan pendidikan yang diusung oleh para Yesuit pendirinya.

Penulis sendiri diutus menjalani Tahun Orientasi Kerasulan (TOK) di Yayasan Kanisius Cabang (YKC) Surakarta pada tahun 2020 hingga 2022. Masa dua tahun tersebut ditandai dengan pandemi Covid-19. Kendati demikian, penulis tetap berusaha menjalani perutusan ini dengan sebaik-baiknya. Dari pengalaman TOK tersebut, penulis memperoleh banyak pembelajaran dan pengetahuan baik dari interaksi dengan pelbagai pihak maupun dari membaca dan memahami pelbagai data dan dokumen.

Ketika merefleksikannya, penulis menemukan YK sebagai suatu lembaga yang di satu sisi punya mimpi dan potensi besar untuk menyelenggarakan pendidikan berlandaskan nilai kekatolikan sesuai dengan *Gravissimum Educationis* (GE) 8-9, tetapi di sisi lain juga menyimpan segudang masalah dan tantangan. Dalam menghadapi keterbatasan finansial,

penurunan jumlah murid, dan harapan masyarakat yang terus berkembang, yayasan ini harus menavigasi tantangan relasional dan operasional yang kompleks, terutama dalam hubungannya dengan KAS. Dari sekian banyak persoalan, penulis memilih berfokus pada problem relasi antara YK dengan Keuskupan Agung Semarang atau Bapak Uskup selaku Pemilik/Pembinanya.

Literatur-literatur sebelumnya mengenai yayasan pendidikan berbasis keagamaan umumnya membahas hal-hal terkait praktik pembelajaran (Agustina, Rohmah, & Kuspiyah, 2019), identitas (Puspitasari, Misyuraidah, Fauzi, & Syarnubi, 2019), keselarasan visi-misi (Afifah, Nurjaman, & Fatkhulloh, 2022), serta struktur tata kelola (Sutrianti, 2019). Namun, sedikit penelitian yang mengkaji secara mendalam dinamika relasional antara YK dan struktur keuskupan dalam konteks sosio-kultural Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan multidimensional antara YK dan KAS, dengan fokus pada faktor-faktor teologis, sosial, dan organisasional yang membentuk kemitraan ini. Dengan menggunakan kerangka filsafat sosial Jawa, dinamika kekuasaan Foucault, dan prinsip spiritualitas Ignasian, tulisan ini berupaya mengidentifikasi jalur untuk memperbaiki dialog, keselarasan strategis, dan berbagi sumber daya antara YK dan KAS. Pada akhirnya, penelitian ini berharap dapat berkontribusi pada model “ketaatan kreatif” dalam kemitraan gerejawi, dengan menawarkan cara bagi YK dan KAS untuk bekerja selaras menuju misi pendidikan dan sosial yang mereka emban bersama.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan analisis literatur dengan wawasan yang diperoleh dari pengalaman empiris penulis di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengontekstualisasikan teori dengan praktik dalam hubungan antara YK dan KAS. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi tantangan relasional dan peluang kolaborasi antara YK dan KAS.

Penelitian ini bertumpu pada studi pustaka kualitatif yang mencakup analisis teks-teks teologi misi, spiritualitas, dan pastoral, serta filsafat sosial guna membangun kerangka analisis yang komprehensif. Studi pustaka ini dilandasi oleh pengalaman penulis selama dua tahun bekerja di YKC Surakarta, yang memberikan dasar praktis mengenai dinamika operasional dan relasional antara YK dan KAS. Analisis sumber-sumber tertulis, termasuk dokumen-dokumen Gereja, teks-teks teologis, dan studi akademis, diperkaya oleh pengamatan langsung dan

interaksi penulis dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam YK. Wawasan empiris ini membantu mengontekstualisasikan literatur, menambah kedalaman dalam pembahasan tentang kepemimpinan, tantangan komunikasi, dan keselarasan strategis antara YK dan KAS. Pendekatan gabungan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep teoretis sebagaimana yang diaktualisasikan dalam konteks praktis gerejawi dan pendidikan.

Bidang kajian yang dipilih meliputi beberapa disiplin utama. Dalam filsafat, penelitian ini mengadopsi perspektif filsafat sosial Jawa dan ide-ide filsafat dari Michel Foucault, khususnya teorinya tentang kekuasaan dan dinamika relasi. Lensa filosofis ini membantu memperjelas pengaruh hierarki dan budaya dalam interaksi internal YK dan dalam relasinya dengan KAS. Teologi misi berperan penting dalam mengeksplorasi komitmen evangelis dan sosial yang mendasari misi pendidikan YK. Penelitian ini merujuk pada kerangka teologis dari dokumen-dokumen Vatikan, termasuk *Gravissimum Educationis*, *Fratelli Tutti*, dan *Evangelii Gaudium*, untuk memahami bagaimana misi YK selaras dengan panggilan Gereja untuk melayani komunitas yang terpinggirkan melalui pendidikan.

Di sisi lain, teologi spiritualitas, terutama spiritualitas Ignasian, menyediakan perspektif interpretatif untuk memahami konsep "ketaatan kreatif." Prinsip ini, yang berakar pada spiritualitas Ignasian, menekankan fleksibilitas dalam ketaatan kepada otoritas gerejawi dan membentuk pendekatan penelitian ini dalam upaya menciptakan kemitraan yang harmonis antara YK dan KAS. Akhirnya, teologi pastoral menjadi panduan dalam mengkaji dinamika praktis gerejawi, dengan fokus pada bagaimana pelayanan pastoral dan kepemimpinan pelayan dapat meningkatkan hubungan antara YK dan KAS. Ini termasuk menggali potensi pendekatan sinodal, yang terinspirasi oleh *Fratelli Tutti* dan *Evangelii Gaudium*, untuk memperkuat komunikasi, dukungan timbal balik, dan berbagi sumber daya. Jadi, pendekatan multidisipliner yang memadukan analisis literatur dengan wawasan empiris tersebut menghadirkan kerangka penelitian yang holistik dan kontekstual. Hal ini memungkinkan eksplorasi mendalam atas teori dan praktik untuk memperkuat sinergi relasional antara YK dan KAS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Selayang Pandang Yayasan (Pendidikan) Kanisius

Ditinjau dari segi historis, berdirinya Yayasan (Pendidikan) Kanisius tidak dapat dilepaskan dari Kolese Xaverius Muntilan yang didirikan oleh Rama Fransiskus Georgius van

Lith, S.J. Sekolah pendidikan calon guru tersebut pada awalnya merekrut anak-anak di sekitar Muntilan yang ingin menjadi guru. Lama-kelamaan, disadari bahwa dalam waktu 3-4 tahun, proses mendidik calon guru tidaklah cukup. Apalagi mereka yang masuk acapkali sangat minim atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan dasar sebelumnya. Maka disadari bahwa dibutuhkan pendidikan rendah (sekolah dasar atau sekolah rakyat) untuk mempersiapkan murid-murid yang hendak masuk ke sana. Pada tanggal 31 Agustus 1918 di Muntilan didirikan “*Canisius Vereniging*” atau Perkumpulan Kanisius. Rama J.H.J.L. Hoeberechts, S.J. menjadi ketua dan Rama van Lith, S.J. sebagai sekretarisnya. Itulah latar belakang pendirian sekolah-sekolah Kanisius.

Oleh karena tujuan awalnya menjadi pemasok siswa untuk persiapan masuk ke sekolah guru (SPG, setingkat SMA), maka terdapat beberapa ciri khas sekolah-sekolah Kanisius. *Pertama*, sekolah Kanisius banyak terletak di pedesaan maupun pelosok karena diharapkan para calon guru berasal dari segala penjuru Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dengan demikian setelah lulus sekolah guru kelak mereka siap diminta kembali ke desanya untuk mengajar orang-orang dari daerah asalnya. *Kedua*, sekolah ada lebih dahulu daripada Gereja dikarenakan strategi misi yang ditempuh Romo van Lith dkk adalah strategi edukasi dan budaya. Setelah orang mengalami pendidikan sekolah-sekolah Katolik yang berkualitas dan penuh kasih, diharapkan mereka pun dengan sendirinya akan tertarik memeluk agama Katolik dan minta dibaptis dengan penuh kesadaran pribadi. *Ketiga*, mayoritas sekolah Kanisius adalah di jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP). Sekali lagi ini terkait dengan tujuan pendirian sekolah Kanisius yaitu sebagai *feeder* siswa untuk sekolah guru.

Barangkali muncul pertanyaan, lantas mengapa YK pada saat ini mempunyai beberapa sekolah menengah atas atau kejuruan (sebagaimana di cabang Surakarta terdapat 3 SMA dan 2 SMK per tahun ajaran 2020/2021)? Sekolah-sekolah tersebut sejatinya tidak didirikan oleh YK tetapi oleh beberapa pihak lain, entah paroki (inisiatif pastor paroki) maupun umat beriman setempat. Ketika sudah berjalan beberapa tahun dan mereka mengalami pelbagai kesulitan (biaya, SDM, administrasi, dll) akhirnya sekolah-sekolah tersebut diserahkan kepada YK untuk dikelola.

Selama 104 tahun berdiri, sekolah-sekolah Kanisius telah banyak berkontribusi bagi bangsa Indonesia dan Gereja Katolik. Sekolah Kanisius telah mendidik anak-anak Indonesia dari generasi ke generasi dengan semangat dan ajaran Kristiani. Di saat pemerintah belum sanggup menyediakan pendidikan berkualitas, sekolah Kanisius menjadi pionir edukasi yang amat berjasa. Ini selaras dengan amanat GE 1, “Semua orang tanpa terkecuali punya hak yang

tak dapat diganggu gugat atas pendidikan” (Dokumen Konsili Vatikan II, 2021). Tak hanya itu, sekolah Kanisius berperan pula menanamkan benih iman sehingga menjadi cikal bakal komunitas Gerejani lokal.

Pada tahun ajaran 2020/2021 ketika penulis datang pertama kali di YKC Surakarta, terdapat 40 sekolah yang dikelola yayasan (atau 42, jika KB dihitung sebagai entitas mandiri); terdiri dari (2 KB), 13 TK, 17 SD, 5 SMP, 3 SMA, dan 2 SMK. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di pelbagai wilayah Kevikepan Surakarta, yakni di Solo, Karanganyar, Klaten, Wonogiri, dan Boyolali. Adapun jumlah guru/karyawan sebanyak 419, murid 4.615, serta melayani pula sekitar 8 ribuan orang tua murid (per Oktober 2020).

Sebagaimana umum dijumpai di pulau Jawa, dilihat dari konteks agama, mayoritas siswa Kanisius beragama Katolik di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Namun ada data menarik untuk persentase agama siswa di jenjang SMA: Katolik hanya 7% sementara Islam 48%. Ini karena di wilayah Tirtomoyo, Baturetno, Wonogiri yang terdapat SMP dan SMA Kanisius, siswa yang beragama Islam justru menjadi mayoritas, yakni mendekati 90% (Tim Peneliti Universitas Sanata Dharma, 2016, hlm. 148). Meskipun dari tahun ke tahun terus menurun dan defisit keuangannya cukup memprihatinkan, kehadiran sekolah Kanisius di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam cukup menarik perhatian.

Ditinjau dari konteks wilayahnya, setiap kota mempunyai kekhasannya masing-masing. Di kota Solo, sekolah Kanisius masih relatif diminati karena tradisi turun-temurun orang belajar di sekolah Kanisius masih kuat. Minat terhadap sekolah Kanisius yang masih kuat juga terjadi di Klaten karena secara tradisional para pensiunan yang tinggal di sana yakin bahwa cucu-cucu mereka harus mendapatkan pendidikan dasar di sekolah Katolik. Namun demikian, di wilayah desa seperti Mlese dan Bayat, minat akan sekolah Kanisius tidak sebanyak di kota. Alasannya selain karena jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanyak di kota, beberapa keluarga memilih menyekolahkan anak mereka ke kota. Sementara itu, mereka yang bertahan di desa lebih memilih sekolah negeri atau sekolah Islam sesuai dengan agama mayoritas.

Situasi yang kurang lebih sama terjadi di wilayah Karanganyar dan Boyolali yang terkenal sebagai daerah “hijau”. Di sana, orang Katolik cenderung untuk mencari sekolah unggul di kota lain bagi anak-anak mereka. Sementara itu orang Islam biasanya lebih memilih negeri atau sekolah Islam bagi putra-putri mereka. Itulah mengapa sekolah Kanisius di Jumapolo (Karanganyar wilayah desa), Karanganyar kota, dan Boyolali tidak terlalu diminati. Indikatornya sederhana, kuota satu kelas tidak pernah terpenuhi. Maka, pada awal tahun ajaran 2020/2021 terdapat dua sekolah Kanisius di wilayah Boyolali, yakni SMPK Ampel dan SMAK

Yos Sudarso Boyolali yang akhirnya ditutup. Sementara itu, wilayah Wonogiri ditandai dengan warga asli cenderung merantau ke luar kota., Yang tetap tinggal di sana adalah orang tua mereka (kakek-nenek) bersama cucu. Sebagian dari mereka yang Katolik masih menyekolahkan anak-anak di Kanisius. Bagi mereka yang taraf ekonominya menengah ke bawah, sekolah negeri gratis lebih jadi pilihan; sedangkan orang yang relatif kaya memilih bersekolah di kota Solo.

Pada tahun ajaran 2021/2022 dua sekolah (SMPK Ampel dan TKK Watuagung) terpaksa ditutup karena tidak ada murid yang mendaftar. Pada tahun 2022/2023, SMPK 2 Surakarta ditutup. Kemudian diproyeksikan pada tahun 2024/2025 tiga sekolah (SMAK Bharata, SMAK Yos Sudarso Boyolali, SDK Watuagung) juga akan ditutup dengan alasan yang sama. Dengan demikian jumlah guru/karyawan serta murid pun otomatis berkurang. Pada akhir tahun ajaran 2021/2022 tersebut, terdapat 403 guru/karyawan serta 4.371 murid.

Mengenai konteks, sesungguhnya cukup sulit menyajikan data *general*, karena konteks wilayah yang amat beragam kendati masih ada dalam satu wilayah Kevikepan Surakarta. Sebagian sekolah ada di kota (Solo, Klaten, Wonogiri), di pinggiran kota (Wedi, Delanggu, Baturetno), dan sebagian di desa (Mlese, Watuagung, Jumapolo, dll). Jika dirinci lebih detail sekolah Kanisius yang ada di kota ada 17, di pinggiran kota ada 9, dan di desa ada 14.

Ditinjau dari kesukuan, mayoritas siswa dan guru bersuku Jawa. Akan tetapi terdapat sedikit pengecualian untuk beberapa sekolah yang mayoritas siswanya beretnis Tionghoa. Di SMKK Bharata Karanganyar, mayoritas siswanya beretnis Dayak karena mereka didatangkan dari daerah Ketapang. Sementara itu, di SMAK Yos Sudarso Boyolali, mayoritas siswanya bersuku Dayak dari Kalimantan dan beretnis Flores dari NTT.

Kemudian, ditinjau dari konteks ekonomi, para murid punya latar belakang keluarga yang bervariasi, dari miskin sampai kaya. Tolok ukur yang paling sederhana dapat ditilik dari SPP. Di satu sisi, ada sekolah (SDK Keprabon 02 Surakarta) yang menetapkan biaya pendidikan rata-rata 400 ribu rupiah per siswa per bulan, tapi di sisi lain ada sekolah yang untuk menetapkan SPP rata-rata 50 ribu rupiah per siswa per bulan saja tidak mampu (misalnya di TKK/SDK Mlese Klaten, TKK/SDK Watuagung Baturetno, dan TKK Kedawung Jumapolo).

Dari 40 sekolah yang ada, dapat dibedakan tiga kategori ditinjau dari ekonomi: *sekolah surplus*, *sekolah impas*, dan *sekolah defisit*. Tercatat di YKC Surakarta hanya ada dua sekolah surplus, sedangkan 11 sekolah impas dan 27 sekolah lainnya defisit. Dengan situasi seperti itu, tidak mengherankan jika mekanisme subsidi silang antar sekolah maupun antar murid tidak dapat berjalan dengan baik. Akhirnya, yayasan mengalami defisit demi defisit keuangan setiap

tahunnya. Puncaknya pada tahun 2019, defisit keuangan YKC Surakarta saja (belum melihat cabang lainnya yang juga defisit) mencapai 2,1 milyar rupiah!

3.2. Membangun Relasi Harmonis Sebagai Tantangan

Hubungan antara YK dan KAS menghadapi tantangan yang memengaruhi operasional dan efektivitas misi pendidikan Katolik. Ketidakhadiran pihak keuskupan dalam pengambilan keputusan strategis dan hambatan komunikasi menjadi sorotan utama. Melalui analisis budaya Jawa dan perspektif kekuasaan Foucault, teks ini mengeksplorasi akar persoalan serta menawarkan refleksi untuk menciptakan relasi yang lebih harmonis dan produktif.

3.2.1. Indikasi Masalah Relasi YK dan KAS

Tentu saja terdapat pelbagai tantangan yang dihadapi YK. Namun demikian, relasi YK yang kurang baik dengan KAS sebagai pemiliknya adalah tantangan yang menurut penulis paling krusial. Sebab persoalan itu akan sangat menghambat dan menghancurkan lembaga ini bila tidak segera diatasi. Terdapat beberapa indikasi kurang harmonisnya relasi di antara keduanya:

Pertama, selama lima tahun, Bapak Uskup KAS sebagai Ketua Pembina YK tidak pernah hadir dalam rapat pleno Yayasan. Ketidakhadiran ini menyulitkan pengelola Yayasan dalam mengambil keputusan strategis. Padahal mereka yang bekerja di level operasional hanya bisa bergerak manakala sudah ada ketok palu dari Ketua Pembina Yayasan sebagai dasar yuridis. Tanpa bekal itu, jika pengelola Yayasan nekat melangkah dengan rencana dan kemauan sendiri, mereka berpotensi tersangkut beberapa masalah hukum dan tentu itu bukan sesuatu yang diharapkan.

Kedua, tidak jelasnya kebijakan yang digariskan. Persoalan kedua ini merupakan dampak lanjutan dari persoalan pertama di atas. Karena Bapak Uskup sering berhalangan hadir dalam rapat organ yayasan, maka apa yang semestinya bisa menjadi kebijakan untuk dipegang dan dilaksanakan bersama menjadi kabur. Hal itu ditambah runyam dengan adanya pendapat simpang siur yang diklaim sebagai pendapat Uskup, antara lain: pokoknya tidak boleh menutup sekolah apapun kondisinya dan pokoknya tidak boleh menjual atau memanfaatkan aset yayasan apapun keadaannya. Padahal, ada situasi di lapangan yang menuntut untuk, misalnya, sekolah ditutup karena tidak ada lagi siswa yang mendaftar ke sana. Ada pula kebutuhan mendesak soal pendanaan, baik untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun perbaikan infrastruktur sekolah yang dapat dipenuhi dengan penjualan atau pemanfaatan aset yayasan. Ketidakjelasan

garis kebijakan membuat para pelaksana YK mengalami *stalemate* (maju tidak mampu, mundur tidak bisa).

Ketiga, tiadanya bantuan finansial dari KAS. Selama dua tahun penulis menjalani masa TOK di YKC Surakarta, terdapat empat proyek renovasi gedung sekolah yang terpaksa dilakukan karena kondisinya sudah memprihatinkan dan bahkan cenderung membahayakan. Untuk keempat proyek tersebut, pengelola Yayasan sudah mengajukan proposal permohonan bantuan dana ke KAS. Namun demikian, tidak ada satupun proposal yang mendapat persetujuan. Alasannya ialah tidak ada dana anggaran untuk membantu renovasi sekolah. Akhirnya pihak Yayasan pun melakukan proses penggalangan dana untuk proyek itu dengan dibantu banyak donatur dan pemerhati.

Memang ada argumen yang mengatakan bahwa sumbangan umat beriman sesungguhnya adalah sumbangan keuskupan karena dana keuskupan pada prinsipnya berasal dari umat beriman juga. Namun demikian, jika ada bantuan dana yang secara eksplisit berasal dari keuskupan, itu setidaknya-tidaknya merupakan gestur simbolik bahwa keuskupan mendukung karya pendidikan lewat YK. Oleh sebab itu, tiadanya bantuan dana dapat pula dimaknai secara sebaliknya.

Tiga indikasi tersebut sesungguhnya sudah disoroti sejak tahun 2016 oleh Tim Peneliti dari Universitas Sanata Dharma (Tim Peneliti Universitas Sanata Dharma, 2016, hlm. 351, 385, 412, 423). Indikasi kurang harmonisnya relasi antara YK dan KAS itu akan mengantarkan pada analisis multidimensional berikut ini. Dengan mengupas persoalan tersebut secara kritis dan teliti, harapannya inti persoalannya pun dapat diidentifikasi dengan tepat sehingga pada gilirannya solusi yang jitu pun dapat diupayakan untuk mengatasinya.

3.2.2. Analisis Relasi Kuasa dalam Konteks Budaya Jawa

Sudah umum dikenali bahwa relasi kuasa amat berpengaruh dalam relasi antara atasan dan bawahan. Secara khusus penulis ingin mendekatinya dari perspektif Filsafat Jawa yang menjadi alam pikiran yang melatarbelakangi dan menjadi konteks masyarakat di Jawa Tengah.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam relasi antara atasan dan bawahan dalam budaya Jawa:

- a) **Hormat**: bawahan diharapkan untuk menghormati dan tunduk kepada atasan dengan penuh kesadaran akan posisi dan peran masing-masing (Magnis-Suseno, 1984, hlm. 60–69). Dalam konteks relasi YK dan KAS, rasa hormat sangat dijunjung tinggi, khususnya kepada Bapak Uskup.

- b) Setia dan loyal: bawahan diharapkan untuk setia dan loyal kepada atasan. Konsep setia (*werni*) sangat dihargai dan dianggap sebagai nilai esensial dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab (Magnis-Suseno, 1984, hlm. 66). YK dapat dikatakan setia dan loyal kepada Bapak Uskup selaku pemilik atau pembina.
- c) Kepedulian sosial (*sumangga*): atasan diharapkan memperhatikan kesejahteraan bawahan dan memastikan keseimbangan antara tugas-tugas yang diberikan dan kebutuhan pribadi mereka, sementara bawahan diharapkan untuk berbakti dan menjaga kehormatan atasan (Magnis-Suseno, 1984, hlm. 66). Ketidakhadiran Bapak Uskup dalam rapat YK mencerminkan mudurnya nilai ini, sehingga memperburuk persepsi bawahan terhadap kepemimpinan beliau.
- d) Rendah hati (*santun*): baik atasan maupun bawahan diharapkan untuk bersikap rendah hati dan tidak berlaku arogan. Sikap yang rendah hati ini akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan saling mendukung (Magnis-Suseno, 1984, hlm. 39–40). Nilai kerendahan hati dan sopan santun ini dijunjung tinggi dalam relasi YK dengan KAS.
- e) Kesepadanan (*rasa*): atasan diharapkan memberikan penghargaan yang setimpal bagi kinerja bawahan, sementara bawahan diharapkan memberikan usaha maksimal dalam menjalankan tugas yang diberikan (Magnis-Suseno, 1984, hlm. 69–81). Dalam konteks relasi YK dan KAS, pihak YK merasa bahwa upaya untuk menyelenggarakan pendidikan telah dilakukan secara maksimal tetapi kurang mendapatkan penghargaan serta perhatian dari Bapak Uskup selaku pemiliknya.
- f) Musyawarah untuk mufakat (*ngumpulke rame*): Atasan diharapkan mendengarkan pendapat bawahan sebelum mengambil keputusan penting (Koentjaraningrat, 1969, hlm. 35; Magnis-Suseno, 1984, hlm. 51–52; Mulder, 1978, hlm. 40). Ketidakhadiran Bapak Uskup dalam beberapa kesempatan rapat YK menyulitkan nilai musyawarah untuk terwujud.

Di sisi lain, budaya *patronage* dan otoritas ala Jawa yang ditandai dengan beberapa ciri yang khas tersebut begitu memengaruhi relasi antara pimpinan dengan anggotanya. Ciri tersebut antara lain *rikuh pakewuh* (segan), enggan beradu argumentasi secara frontal, enggan mengambil keputusan tegas (sehingga sering diasosiasikan dengan sikap mengambang/takut/pengecut), atasan menampilkan otoritasnya dengan menerapkan protokol hierarkis-prosedural-feodal dan sebaliknya bawahan harus *sowan* (datang menghadap) kepada atasan untuk menerima arahan (Magnis-Suseno, 1984, hlm. 58–59).

Ciri ini begitu tampak dalam relasi antara YK (dalam hal ini sebagai bawahan) dan Bapak Uskup (selaku atasan). Itu salah satu penjelasan yang masuk akal mengapa terjadi kesulitan komunikasi antara keduanya yang pada gilirannya berdampak kurang menguntungkan pula pada keharmonisan relasi. Dari wawancara penulis dengan Kepala YK Cabang Surakarta, terkuak keluh kesahnya yang secara garis besar merasa tidak puas kepada Bapak Uskup. Misalnya, menurutnya Bapak Uskup kurang memperhatikan lembaga miliknya sendiri, terkesan pilih kasih terhadap lembaga-lembaga pendidikan milik KAS (sebagai catatan, di samping Kanisius, ada sekolah-sekolah Mangunan, Theresiana, Sanjaya yang juga dimiliki oleh KAS), dan dianggap kurang peduli pada pendidikan Katolik. Namun demikian, menurut penulis, juga tidak ada tindak lanjut yang berarti dari pihak Yayasan untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya dengan menulis surat ke Bapak Uskup ataupun berkunjung ke Wisma Keuskupan untuk menyampaikan aspirasi. Akibatnya yang terjadi hanyalah gerutu dan keluhan dari hari ke hari tanpa ada penyelesaian.

Menariknya, kalau direfleksikan dengan jujur, relasi semacam ini ternyata tidak hanya terjadi antara YK dan Bapak Uskup; tetapi juga tampak dalam relasi-relasi kuasa yang ada di internal YK sendiri, misalnya antara guru dan kepala sekolah, antara kepala sekolah dan kepala cabang yayasan, serta antara kepala cabang yayasan dan direktur yayasan pusat atau pengurus yayasan. Dari kunjungan penulis ke sekolah-sekolah dalam kapasitas sebagai TOK-er, penulis banyak menerima keluhan, gerutu, atau pun curahan hati dari para guru dan kepala sekolah tentang kepemimpinan kepala cabang yang kurang sesuai dengan harapan mereka. Namun ketika penulis mendorong mereka untuk mengungkapkan kekurangcocokan tersebut secara langsung kepada yang bersangkutan, mereka enggan karena takut, segan, dan sejenisnya. Malahan ada pula yang meminta penulis menjadi penyampai pesan. Menurut penulis, hal ini merupakan penghalang sosial-kultural yang mesti disingkirkan jika ingin tercipta komunikasi dan relasi yang harmonis antara YK dan KAS.

3.2.3. Analisis Relasi Kuasa dalam Perspektif Foucault

Selain itu, filsafat kuasa juga dapat memberi perspektif untuk memandang persoalan di atas. Michel Foucault mengatakan bahwa kekuasaan selalu terhubung dengan relasi. Kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri tanpa relasi. Selalu akan ada pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai. Untuk mengoperasikan kekuasaan itu, penguasa dapat menempuh dua jalan, yakni kekerasan dan disiplin (Koopman, 2017). Kekerasan adalah cara memaksa pihak yang dikuasai agar tunduk kepada penguasa (Kebung, 2018, hlm. 47). Bentuk kekerasan tidak

harus fisik, tetapi bisa juga secara verbal dan psikis. Sementara itu, disiplin adalah cara untuk membuat pihak yang dikuasai taat dan patuh pada penguasa secara tidak langsung dan tanpa paksaan yang jelas. Disiplin berbeda dengan kekerasan, sebab kekerasan berisiko menghancurkan, sementara disiplin bertujuan untuk melatih atau me-normal-kan (Kamahi, 2017, hlm. 119, 125–126). Poin pentingnya, baik kekuasaan maupun disiplin digunakan untuk menguasai atau mendominasi.

Filsafat kekuasaan Foucault merupakan adaptasi kreatif dari filsafat kekuasaan Max Weber. Menurut Weber, kekuasaan selalu mengandung kekerasan fisik karena Weber bertitik tolak dari kekuasaan negara. Namun, Foucault memodifikasi konsep kekuasaan tersebut dengan menyatakan bahwa kekerasan tidak harus dalam bentuk fisik. Dalam penjara, misalnya, adanya menara jaga (*panopticon*) yang mengawasi para tahanan selama 24 jam merupakan bentuk penerapan kekuasaan tanpa melibatkan kekerasan fisik (Afandi, 2012, hlm. 146).

Dalam konteks YK, relasi kuasa tersebut dapat ditemukan konkretisasinya ketika Bapak Uskup KAS tidak hadir dalam rapat yayasan selama lima tahun. Ketidakhadiran beliau berdampak pada kesulitan YK menentukan dan menerapkan rencana strategisnya sehingga terjadi banyak persoalan yang tak teratasi. Ketidakhadiran Bapak Uskup menunjukkan bentuk "pendisiplinan" ala Foucault, di mana kekuasaan dipertahankan melalui absensi dan kontrol implisit. Dampaknya adalah stagnasi dan kebuntuan di tingkat operasional. Dalam hal ini, selaras dengan pemikiran Foucault, apa yang dilakukan Bapak Uskup pun bukan termasuk suatu kekerasan, melainkan "pendisiplinan".

Demikian pula halnya relasi kuasa ini terjadi secara nyata dalam internal YK, misalnya dalam kasus relasi antara kepala cabang dengan kepala sekolah tadi. Namun, satu hal penting yang dapat dimaknai di sini adalah mengedepankan relasi kuasa melulu tidak akan menghasilkan kebaikan apapun bagi semua pihak. Maka dari itu, diperlukan pendekatan cara lain supaya kebuntuan komunikasi dan koordinasi ini dapat terselesaikan.

Kesimpulannya, relasi antara YK dan KAS menghadapi tantangan serius yang berakar pada komunikasi yang tidak efektif, kebijakan yang tidak jelas, dan kurangnya dukungan, baik finansial maupun strategis, dari KAS kepada YK. Masalah ini diperburuk oleh budaya Jawa yang menekankan hierarki dan kehormatan, sehingga menciptakan hambatan dalam menyampaikan aspirasi atau kritik secara langsung. Analisis dengan perspektif kekuasaan ala Foucault mengungkap bahwa ketidakhadiran dan sikap pasif dari pihak KAS dapat dilihat sebagai bentuk pendisiplinan yang mempertegas relasi kuasa, yang berdampak negatif pada pengambilan keputusan strategis dan operasional YK. Oleh karena itu, komunikasi yang lebih

terbuka, partisipasi aktif dari KAS, serta pemecahan hambatan sosial-budaya sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang harmonis dan produktif.

3.3. Sinodalitas Melalui Dialog dan Komunikasi

Bagian ini berupaya mengeksplorasi dua aspek teologis utama yang relevan dengan praktik hidup berkomunitas dalam Gereja kontemporer. Pertama, inspirasi teologis dari kisah Konsili Yerusalem (Kis 15:1-33) yang menyoroti model pengambilan keputusan bersama dalam komunitas iman awal. Kedua, refleksi tentang sinodalitas dan solidaritas sebagaimana ditekankan dalam ajaran Gereja modern, khususnya dalam dokumen *Evangelii Gaudium* dan *Fratelli Tutti*.

3.3.1. Inspirasi Teologis dari Kisah Konsili Yerusalem (Kis 15:1-33)

Perikop Kitab Suci yang menurut penulis dapat menerangi pembahasan tentang relasi antara YK dan Keuskupan Agung Semarang adalah Kis 15:1-33. Perikop tersebut menurut penulis memuat ide-ide dasar dari sinodalitas Gereja. Terdapat beberapa poin inspirasi teologis yang penulis temukan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, kunci mengatasi pelbagai persoalan dalam Gereja sesungguhnya adalah dialog. Acapkali permasalahan yang timbul di tengah jemaat berakar pada kurangnya perjumpaan. Hal itu diperparah pula jika ada keengganan antara anggota jemaat yang berkonflik untuk bertemu dan mendiskusikan duduk persoalannya untuk kemudian mencari solusi bersama. Belajar dari “konflik” jemaat Antiokhia dan jemaat Yahudi dalam Kis 15:1-33 di atas, Gereja perlu mengupayakan secara sungguh-sungguh pertemuan antara anggota jemaat dengan suasana yang "menggembirakan hati".

Adanya pertemuan dengan agenda dan topik yang jelas sangatlah penting. Dalam Kis 15:1-33, agenda dan topik Konsili Yerusalem cukup jelas dan fokus, yakni perlukah sunat dan menjalankan kewajiban Taurat bagi orang non-Yahudi. Mungkin ada pula masalah lain yang timbul di tengah jemaat, tetapi faktanya dua persoalan itu sajalah yang dibicarakan dan dicari solusinya dalam Konsili Yerusalem. Lebih baik menyelesaikan persoalan dengan cara sedikit demi sedikit mengatasinya ketimbang berpretensi ingin menyelesaikan semuanya sekaligus tetapi akhirnya tidak ada yang berhasil teratasi. Prinsip ini relevan untuk relasi antara YK dan KAS. Ketidakhadiran dialog yang terorganisir antara kedua pihak menghambat pengambilan keputusan yang mendukung keberlangsungan misi pendidikan Katolik.

Kedua, sebagai proses yang dilaksanakan bersama-sama, anggota Gereja harus berperan secara aktif dan tidak boleh hanya mengandalkan atau bergantung pada pimpinan. Dalam

perikop Kis 15:1-33, jelas dikisahkan bahwa inisiatif untuk mendiskusikan persoalan tentang kewajiban menjalankan hukum Taurat berasal dari jemaat Antiokhia yang menghadapi kesulitan karena itu. Model Gereja yang *bottom-up* semacam ini lebih selaras dengan prinsip sinodalitas ketimbang model *top-down*. Pasalnya, yang secara faktual mengerti duduk persoalan di tengah jemaat adalah mereka yang berada “di bawah” atau di lapangan.

Dalam menyelesaikan persoalan di tengah jemaat, tidak mungkin bila semua anggota Gereja berkumpul dan menyampaikan pendapatnya satu per satu. Oleh sebab itu, sebagaimana langkah yang ditempuh jemaat Antiokhia, memilih perwakilan adalah cara yang paling masuk akal. Hal penting lainnya, belajar dari figur Paulus dan Barnabas, perwakilan itu pada permulaan seyogianya menceritakan terlebih dahulu hal-hal baik yang sudah dicapai atau dialami oleh jemaat. Jangan sampai sedari awal ia langsung menyoroti persoalan, mengeluh, bersikap reaktif atas kritikan, atau sikap-sikap negatif dan kontraproduktif lainnya. Dalam konteks YK, perlu ada mekanisme representasi yang memungkinkan suara dari tingkat cabang dan sekolah didengar oleh Keuskupan, sehingga keputusan yang diambil lebih realistis dan operasional.

Ketiga, tidak hanya anggota Gereja dari kalangan akar rumput saja yang dituntut ideal, para pemimpin Gereja pun semestinya demikian. Para pemimpin Gereja yang berprinsip sinodal haruslah pribadi yang terbuka pada masukan dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Mereka mesti mau mendengarkan keluhan dan saran yang disampaikan kepadanya (Ivereigh, 2020, hlm. 85). Bahkan alangkah lebih baik jika mereka mampu mendeteksi kesulitan yang dihadapi jemaatnya sekalipun itu tidak terungkap secara eksplisit. Dalam hal ini, Petrus dapat dijadikan teladan. Demikian pula Yakobus yang dapat menengahi, membuka cakrawala dan memberi nasihat yang mencerahkan. Jika Bapak Uskup selaku pemimpin tertinggi dan pemilik YK melakukan apa yang dibuat Petrus dan Yakobus, tentu persoalan yang dihadapi YK dapat teratasi dengan lebih baik.

Keempat, harus disebut pula bahwa pribadi-pribadi yang mengikuti Konsili Yerusalem adalah pribadi-pribadi pemberani dalam mengambil keputusan yang memang-memang secara tegas dan jelas. Setelah keputusan diambil dan terbukti bahwa proses sinodal sebelum keputusan itu lahir adalah proses yang sungguh baik, mereka semua sepakat menerima hasilnya secara bulat. Ini menunjukkan kedewasaan dan kematangan pribadi-pribadi yang menjalankan suatu prinsip sinodalitas. Dalam konteks relasi YK dan KAS, keputusan yang baik akan dapat diambil jika masing-masing pihak rela berproses secara sinodal dan dengan itikad baik.

Kelima, setelah pertemuan dilaksanakan dengan baik dan keputusan diambil secara mantap, hasilnya disampaikan dengan tidak kalah positif pula oleh perwakilan peserta konsili kepada jemaat yang mengangkat atau mengusulkan pembahasan tersebut. Yudas dan Silas melakukan tugas itu dengan baik. Terbukti, jemaat Antiokhia yang menerima pewartaan hasil Konsili Yerusalem merasa bersukacita. Apa yang terjadi setelah Konsili Yerusalem ini tentu dapat direplikasi dalam konteks YK apabila proses komunikasi dan pengambilan keputusan bersama sebagaimana telah dijelaskan dalam poin keempat berjalan dengan baik.

Ungkapan yang disampaikan Mgr. Robertus Rubiyatmoko, Uskup Agung KAS untuk membahasakan sinodalitas secara sederhana, yakni “*lungguh bareng, ngrembug bareng, mutuske bareng lan nandangi bareng*” (duduk bersama, diskusi bersama, memutuskan bersama, dan menjalankan keputusan bersama) kiranya dapat menjadi acuan tentang bagaimana Gereja seharusnya beroperasi dan hidup (Esti, 2023). Hasil atau keputusan yang lahir dari proses sinodal yang berjalan secara demikian baik tentu akan serta merta disambut oleh jemaat tanpa persoalan berarti. Penulis meyakini bahwa jika inspirasi-inspirasi dari Kis 15:1-33 di atas sungguh dihidupi dalam relasi antara YK dan KAS, Gereja dapat benar-benar menjadi komunitas yang berjalan bersama untuk membawa kabar sukacita bagi dunia.

3.3.2. Sinodalitas dan Solidaritas dalam *Evangelii Gaudium* dan *Fratelli Tutti*

Dari sudut pandang teologi misi, dokumen Gereja yang menurut penulis relatif aktual dan dapat digunakan untuk membahas relasi YK dan KAS adalah *Evangelii Gaudium* (EG) (Fransiskus, 2014) yang dikeluarkan Paus Fransiskus tahun 2013. Dalam EG dapat ditemukan gagasan tentang solidaritas pada sesama yang miskin. Ini sesuai dengan salah satu misi YK untuk memberikan pendidikan bagi kaum miskin dan terpinggirkan di pelosok desa.

Paus Fransiskus menekankan bahwa Gereja harus secara aktif bergerak ke luar diri sendiri untuk mencari mereka yang miskin dan terpinggirkan dalam masyarakat (EG 58). Poin ini menegaskan perlunya Gereja untuk menjadikan orang miskin sebagai subjek utama dalam perhatian dan pelayanannya. EG 68 juga menggarisbawahi peran Gereja dalam memperjuangkan hak-hak orang miskin, terutama hak untuk hidup yang layak dan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Solidaritas Gereja pada yang miskin berarti berdiri di samping mereka dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-hak tersebut.

Kemudian dalam EG 71 dan 87, Paus Fransiskus menegaskan pentingnya Gereja dalam memperjuangkan keadilan sosial dan struktural bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Solidaritas Gereja pada yang miskin mengajak untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dan

ketidakadilan, bukan hanya memberikan bantuan sementara. Kehadiran Gereja di daerah-daerah yang miskin harus menjadi saksi kasih dan kepedulian Kristus (Murphy, 2020, hlm. 126).

Selain EG, dokumen lain yang tak kalah relevan adalah Ensiklik *Fratelli Tutti* (FT) (Fransiskus, 2021) yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2020. Ensiklik yang bertajuk persaudaraan dan persahabatan sosial ini memang tidak membahas topik "sinodalitas" secara spesifik. Namun, semangat kolaboratif dan partisipatif ini dapat terlihat terwakili dalam beberapa artikel dalam dokumen tersebut, antara lain:

Dalam FT 77-78, Paus Fransiskus menekankan pentingnya dialog sebagai cara untuk membangun persaudaraan dan menjembatani perbedaan di antara orang-orang. Ia mengajak untuk berbicara, mendengarkan, dan bertukar pandangan secara terbuka, sehingga terbentuklah semangat sinodalitas yang mengakui kepentingan dan pengalaman berbagai pihak. Kemudian, Paus Fransiskus berbicara tentang perlunya membangun masyarakat sipil yang terlibat aktif dalam upaya mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (FT 224-226). Ini mencerminkan semangat sinodalitas yang mengajak partisipasi berbagai kelompok dalam merumuskan solusi bagi masalah sosial. Selanjutnya dalam FT 282-283, Paus Fransiskus menggarisbawahi kebutuhan untuk membangun budaya dialog yang menghormati keragaman dan menghargai perbedaan. Ini mencerminkan prinsip sinodalitas yang mengajak untuk mendengarkan dan memahami pandangan berbagai pihak (Moons, 2022, hlm. 87–88).

Baik dalam EG maupun dalam FT, dapat dengan mudah ditemukan gagasan tentang sinodalitas dan solidaritas yang menerangi tantangan kerja sama antara YK dan KAS. Satu catatan yang perlu penulis kemukakan di sini terkait panggilan solidaritas pada sesama yang miskin dan tersingkir dalam konteks YK adalah jangan sampai dambaan suci tersebut dimaknai secara terlalu naif dan sembrono tanpa adanya strategi yang jelas dan tepat. Misalnya, demi mempertahankan suatu sekolah yang muridnya bisa dihitung dengan jari, anggaran yang signifikan dialokasikan. Dampaknya, sekolah lain yang sesungguhnya masih prospektif lantas menjadi kesulitan merenovasi gedungnya. Bukan tidak mungkin kenaifan dan kesembronoan dalam hal pengelolaan tersebut justru berakibat yayasan secara keseluruhan mengalami rugi berkepanjangan sehingga tidak lagi dapat memperjuangkan misi solidaritasnya. Demikian pula prinsip dialog dan kolaborasi dalam FT (FT 77-78) memberikan inspirasi bagi YK dan KAS untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama. Proses "*lungguh bareng, ngrembug bareng, mutuske bareng lan nandangi bareng*" yang diungkapkan Mgr. Robertus Rubiyatmoko mencerminkan semangat ini dan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki relasi kedua pihak.

Inspirasi dari Kis 15:1-33, *Evangelii Gaudium*, dan *Fratelli Tutti* menunjukkan bahwa dialog, solidaritas, dan partisipasi aktif adalah kunci untuk memperkuat relasi antara YK dan KAS. Dengan menghidupi prinsip-prinsip ini, Gereja dapat menjadi komunitas yang tidak hanya melayani, tetapi juga berjalan bersama dalam semangat sinodalitas untuk mewujudkan kabar sukacita bagi semua pihak.

3.4. Spiritualitas Ignatian: Kesepahaman dengan Gereja dan Ketaatan Kreatif

Terakhir dari perspektif spiritualitas, Spiritualitas Ignatian, yang didasarkan pada ajaran Santo Ignatius Loyola, pendiri Ordo Yesuit, dapat juga dijadikan acuan untuk merefleksikan relasi YK dan KAS. Spiritualitas Ignatian menekankan kesepahaman dengan Gereja (*sentire cum Ecclesia*) dan ketaatan kreatif (*creative fidelity*) sebagai dua elemen penting dalam hidup rohani orang Katolik yang mengikutinya. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep tersebut:

Pertama, kesepahaman dengan Gereja (LR 352-370). Ini adalah prinsip dalam spiritualitas Ignatian yang menekankan pentingnya memiliki hubungan yang dekat dengan Gereja Katolik sebagai tubuh Kristus dan wadah sakramen kehidupan rohani. Santo Ignatius menekankan bahwa orang yang mengikuti Latihan Rohani Ignatian harus memiliki kepatuhan dan ketaatan terhadap ajaran Gereja. Ignatius bahkan menyebut Gereja adalah seperti ibu yang harus dihormati dan ditaati dengan setia (Loyola, 1993).

Dalam praktiknya, kesepahaman dengan Gereja berarti bahwa seorang Ignatian harus tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Gereja, hukum moralnya, serta hierarki gerejawi, termasuk imam dan uskup (O'Malley & O'Brien, 2020, hlm. 24). Kesepahaman ini tidak hanya terbatas pada doktrin dan dogma Gereja, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam sakramen Gereja, seperti Ekaristi, Sakramen Tobat, dan Sakramen Pengurapan Orang Sakit.

Santo Ignatius sangat menghargai peran Gereja dalam mendukung dan membimbing umatnya dalam perjalanan rohani. Ia juga menekankan pentingnya mencari bimbingan spiritual dari seorang pembimbing rohani untuk membantu mendalami hubungan dengan Allah dan mengembangkan kehidupan rohani yang lebih dalam.

YK yang notabene dikelola oleh para Jesuit dan pribadi-pribadi yang memeluk Spiritualitas Ignatian tidaklah lepas dari semangat ini dalam relasinya dengan KAS yang merepresentasikan Gereja. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kehendak, arahan, dan keputusan Bapak Uskup akan serta merta ditaati dengan setia. Namun demikian, ketaatan tersebut harus dimaknai secara kreatif sebagaimana akan dijelaskan dalam poin kedua berikut.

Kedua, ketaatan kreatif. Ini adalah konsep dalam spiritualitas Ignatian yang mencerminkan pendekatan fleksibel dan kreatif dalam merespons kehendak Allah dalam hidup. Santo Ignatius percaya bahwa setiap orang memiliki panggilan unik dari Allah, dan ketaatan harus dijalankan secara kreatif sesuai dengan kehendak-Nya. Ketaatan kreatif berarti bahwa seorang Ignatian harus membuka diri untuk mendengar dan mengikuti kehendak Allah dengan hati yang terbuka dan kreatif. Ini mencakup kemampuan untuk merespons berbagai situasi kehidupan dengan cara yang membawa kemuliaan bagi Allah dan melayani sesama manusia dengan cinta dan kasih (Barry & Doherty, 2006, hlm. 93–109).

Santo Ignatius mengajarkan bahwa ketaatan kreatif tidak berarti bertindak sesuka hati atau memilih jalan yang mudah. Sebaliknya, ketaatan kreatif memerlukan refleksi yang mendalam, doa, dan diskresi rohani yang cermat untuk memahami apa yang Allah kehendaki dan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya (Leonardo, 2021, hlm. 15). Dalam praktik sehari-hari, pemeluk Spiritualitas Ignatian didorong untuk menjalani latihan ketaatan kreatif. Di sana mereka mempertimbangkan berbagai kemungkinan tindakan dan implikasinya secara spiritual, moral, dan pastoral sebelum membuat keputusan. Tujuannya adalah untuk mencari kehendak Allah dan mengikuti panggilan-Nya dengan penuh tanggung jawab dan cinta. Ketaatan kreatif bukanlah ketaatan buta, bukanlah sekadar *manut*; melainkan ketaatan setelah memberikan penjelasan yang jernih dan informasi yang menyeluruh dalam dialog yang dewasa dan bijaksana. Karena itulah harapannya keputusan diambil berdasarkan pemahaman utuh dan dapat ditaati pula dengan hati gembira (Pidel, 2022, hlm. 574–575).

Gagasan ketaatan kreatif mestinya tidak hanya berlaku dalam relasi personal-spiritual antara manusia dengan Allah, tetapi juga dalam relasi organisatoris-temporal seperti antara YK dan KAS. Benar bahwa KAS atau Uskup merupakan entitas yang mesti ditaati oleh YK dengan segala ketentuannya. Namun, benar juga bahwa ketaatan tersebut harus dijiwai dengan kreativitas dan keterbukaan untuk menemukan keputusan terbaik bersama-sama. Ketaatan kreatif memberikan ruang bagi YK untuk tetap menghormati otoritas KAS sambil mencari solusi kreatif untuk tantangan operasional. Misalnya, dalam isu seperti penutupan sekolah atau penggunaan aset yayasan, prinsip ini mendorong diskusi dua arah yang mencari solusi terbaik, tanpa mengorbankan nilai-nilai kekatolikan. Sementara itu, dalam situasi sekolah tertentu mengalami kesulitan operasional, ketaatan kreatif mendorong YK untuk tetap mendiskusikan opsi-opsi dengan KAS. Proses ini tidak hanya menghormati otoritas Bapak Uskup, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang memperhatikan realitas di lapangan.

Spiritualitas Ignatian memberikan kerangka yang kaya untuk merefleksikan relasi antara YK dan KAS. Dengan kesepahaman terhadap Gereja, YK dapat menghormati arahan KAS sebagai wujud penghormatan terhadap hierarki gerejawi. Sementara itu, prinsip ketaatan kreatif mendorong adanya dialog yang terbuka dan pengambilan keputusan yang kontekstual dan inovatif. Implementasi dua prinsip ini dapat memperkuat kerja sama dan membawa harmoni dalam menjalankan misi pendidikan Katolik. Namun demikian, sejalan dengan esensi spiritualitas yang mengarah ke interioritas, kedua prinsip ini hanya dapat berhasil jika ada komitmen untuk refleksi rohani dan dialog yang sehat antara YK dan KAS.

3.5. Gereja yang Melayani Umat Allah

Dari perspektif eklesiologi, pandangan teolog Avery Dulles dapat dijadikan alat analisis. Avery Dulles mengemukakan lima model Gereja dan dua di antaranya adalah Gereja institusional dan Gereja pelayan (Baima, 2019, hlm. 6–10). *Institutional Church* menurut Dulles ditandai dengan hierarki yang kaku, prosedural, protokoler, dan mirip seperti birokrasi di pemerintahan atau pemerintahan militer (Jambrek, 2019, hlm. 46–48; Pomplun, 2020, hlm. 99). Dalam arti tertentu relasi antara KAS dan YK saat ini menurut penulis mencerminkan model *institutional Church* tersebut. Sementara itu, *servant Church* mencakup pandangan Dulles tentang sifat dan peran Gereja Katolik dalam dunia. Dalam pandangan ini, Dulles menekankan pentingnya pelayanan dan pemberdayaan Gereja dalam memenuhi kebutuhan dan tantangan masyarakat (Jambrek, 2019, hlm. 50). Konsep ini menurut penulis lebih relevan dalam konteks relasi antara KAS dengan YK yang dimilikinya. Keterkaitan antara eklesiologi *servant Church* dan relasi KAS dengan YK tersebut dapat dipahami dari beberapa perspektif:

Pertama, pelayanan pendidikan. Konsep *servant Church* menekankan pelayanan sebagai inti misi Gereja. Lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Keuskupan dianggap sebagai wahana pelayanan Gereja kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan Katolik diharapkan tidak hanya menyediakan pendidikan berkualitas tinggi, tetapi juga membentuk siswa menjadi individu yang berakhlak baik, beretika, dan berperan aktif dalam masyarakat (GE 3). Dalam konteks YK, ini berarti menyediakan pendidikan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga inklusif, terutama bagi masyarakat miskin. Namun, model pelayanan ini membutuhkan dukungan yang nyata dari KAS sebagai pemilik, baik dalam bentuk arahan strategis maupun alokasi sumber daya. Dalam salah satu kasus, sebuah sekolah di bawah YK menghadapi tantangan jumlah siswa yang terus menurun. Pendekatan *servant Church* mengamanatkan KAS untuk turut serta mencari solusi, baik melalui restrukturisasi

sekolah atau pengembangan program pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kedua, pemberdayaan dan pengembangan individu. Salah satu aspek penting dalam *servant Church* adalah pemberdayaan individu untuk melayani sesama. Dalam konteks lembaga pendidikan, pemberdayaan siswa untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka sesuai dengan panggilan masing-masing menjadi hal yang penting. Keuskupan, melalui lembaga pendidikannya, yakni YK sebagai salah satunya, berperan dalam membantu siswa menemukan dan mengembangkan karunia yang diberikan Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi pelayan dalam masyarakat.

Ketiga, kesaksian nilai-nilai kekatolikan. Lembaga pendidikan Katolik yang dimiliki oleh Keuskupan menjadi tempat di mana nilai-nilai Katolik diajarkan dan diterapkan. Melalui pendidikan berbasis iman, siswa diajak untuk menghayati nilai-nilai kasih, keadilan, dan pengabdian yang dianjurkan oleh ajaran Gereja (GE 7). Dengan demikian, lembaga pendidikan seperti YK berfungsi sebagai wadah penting dalam menerapkan konsep *servant Church* dalam praktik.

Keempat, kolaborasi dan sinergi. Eklesiologi *servant Church* juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam pelayanan. Dalam hubungan antara Keuskupan dan lembaga pendidikan, kolaborasi yang erat harus dibangun untuk mencapai tujuan bersama dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan berkomitmen dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat. Kolaborasi antara KAS dan YK adalah inti dari model *servant Church*. Ini menuntut dialog yang konstruktif dan pengambilan keputusan yang partisipatif. Ketimbang mengandalkan hierarki kaku, kolaborasi semacam ini dapat mendorong sinergi dalam mengatasi tantangan, seperti kebutuhan operasional dan pendanaan. Ketegangan dalam komunikasi antara YK dan KAS, misalnya, dapat diselesaikan dengan membangun forum dialog rutin, di mana kedua pihak dapat mengevaluasi dan merumuskan strategi bersama.

Kelima, kepemimpinan yang melayani. Para pemimpin di lembaga pendidikan Katolik yang terkait dengan Keuskupan diharapkan memiliki semangat pelayanan yang kuat dan berdedikasi untuk memajukan pendidikan dan melayani siswa, guru, dan seluruh komunitas pendidikan. Pemimpin tersebut harus memahami bahwa kepemimpinan yang baik adalah tentang pelayanan dan pengabdian kepada orang lain. Seturut prinsip ini, KAS diharapkan memimpin lembaga pendidikannya seperti YK dengan pelayanan. Contoh bentuk konkretnya adalah dengan menghadiri rapat atau memberi perhatian pada persoalan konkret yang dihadapi YK.

Kesimpulannya, eklesiologi *servant Church* Avery Dulles mencerminkan esensi pelayanan dan pemberdayaan Gereja dalam dunia. Dalam konteks relasi Keuskupan dengan lembaga pendidikan yang dimilikinya, konsep *servant Church* mendorong lembaga pendidikan untuk menjadi wahana pelayanan dan pendidikan yang efektif, menyediakan pendidikan berkualitas tinggi, mengembangkan potensi siswa, dan menerapkan nilai-nilai Katolik dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, kolaborasi antara Keuskupan dan lembaga pendidikan dapat memperkuat misi pelayanan Gereja dalam dunia pendidikan.

Keterlibatan YK untuk melayani umat Allah dalam bidang pendidikan, khususnya mereka yang miskin dan tersingkir bukanlah tanpa dasar teologis. Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengatasi ketidaksetaraan dan menciptakan budaya solidaritas, di mana persaudaraan sejati ditegakkan dan semua orang dihargai. Ia menekankan pentingnya mengatasi "*globalization of indifference*," yaitu pandangan yang acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama manusia (FT 8-9). Dalam FT 64, Paus Fransiskus menyoroti kesenjangan ekonomi yang semakin besar antara kaya dan miskin. Ia mengingatkan kita akan kewajiban kita untuk bertindak dalam solidaritas dengan mereka yang terpinggirkan.

Selanjutnya dalam FT 186-188 Paus Fransiskus menguraikan kisah Orang Samaria dalam konteks persaudaraan. Ia mengajak kita untuk belajar dari kisah ini dan menjadi orang yang peduli, siap mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya dalam FT 242-258, yang bertema "Kepedulian pada Mereka yang Termiskin," Paus Fransiskus dengan tegas menyoroti perlunya membela hak-hak mereka yang terpinggirkan dan rentan, serta mengembangkan masyarakat yang lebih peduli dan responsif. Semangat solidaritas dan pemberdayaan yang ditekankan dalam FT tersebut selaras dengan visi *servant Church*. YK, sebagai perpanjangan misi pelayanan KAS, harus menjadi wujud nyata dari semangat ini, terutama dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan.

YK merupakan representasi Gereja Katolik di garda depan yang memberikan pelayanan nyata kepada masyarakat melalui karya pendidikan. Apalagi secara faktual maupun ideal, mereka yang merasakan manfaat pelayanan YK adalah orang yang miskin dan tersingkir di masyarakat. Maka YK sendiri mesti dikelola dengan model Gereja yang melayani. Dalam berkomunikasi, baik dengan KAS maupun secara internal kelembagaan, model itulah yang semestinya lebih dikedepankan ketimbang pendekatan kekuasaan yang menjadi ciri khas Gereja yang institusional. Semua itu tak lain demi mewujudkan tujuan dan harapan yang luhur dari Gereja itu sendiri

4. KESIMPULAN

Tulisan ini hendak menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara Yayasan Kanisius (YK) dan Keuskupan Agung Semarang (KAS) merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kerjasama di bidang pendidikan Katolik. Relasi yang harmonis dan terjalin dengan saling pengertian akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi finansial maupun sosial. Dalam konteks misi Gereja, kolaborasi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan pendidikan, tetapi juga memperkuat kontribusi YK terhadap pengembangan komunitas gereja dan masyarakat. Semangat sinodalitas, spiritualitas kesepahaman dengan Gereja, dan ketaatan kreatif harus menjadi pendorong bagi YK dan KAS untuk memperbaiki relasi. Relasi yang harmonis ini bukan hanya untuk kepentingan kelembagaan, tetapi demi menghadirkan Kerajaan Allah yang menyelamatkan dunia melalui cinta kasih.

KEPUSTAKAAN

- Afandi, A. K. (2012). Konsep kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2(1), 131–149. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2012.2.1.131-149>.
- Afifah, R., Nurjaman, U., & Fatkhulloh, F. K. (2022). Implementasi visi pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi di lembaga pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(3), 936–950. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i3.973>.
- Agustina, E., Rohmah, A., & Kuspiyah, H. R. (2019). Pendampingan bimbingan belajar bahasa Inggris dan bakti sosial di Yayasan Pendidikan dan Sosial Roudlotut Thullab. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, 1(1), 1–5. <https://journal.unuha.ac.id/index.php/JIMi/article/view/415>.
- Baima, T. A. (2019). *Forming the Church in the modern world: The theological contributions of Avery Cardinal Dulles, SJ*. New Jersey: Paulist Press.
- Barry, W. A., & Doherty, R. G. (2006). *The Jesuit way: Kontemplasi dalam aksi* (A. Sumarwan dkk., Penerj.). Yogyakarta: Kanisius.
- Dokumen Konsili Vatikan II. (2021). *Gravissimum educationis: Sangat pentingnya pendidikan. pernyataan tentang pendidikan Kristen* (R. Hardawiryana, Penerj.). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Esti, B. (2023, Juni 28). *Misa Syukur peringatan HUT ke-83 Keuskupan Agung Semarang*. Diambil 4 Juli 2023, dari Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci—Randusari—Katedral Semarang: <https://katedralsemarang.or.id/misa-syukur-peringatan-hut-ke-83-keuskupan-agung-semarang/>

- Fransiskus, P. (2014). *Evangelii gaudium: Sukacita Injil. Seruan apostolik Paus Fransiskus* (F. X. Adisusanto & B. Harini Tri Prasasti, Penerj.). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Fransiskus, P. (2021). *Fratelli Tutti: Saudara sekalian. Ensiklik Paus Fransiskus tentang persaudaraan dan persahabatan sosial* (M. Harun, Penerj.). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Ivereigh, A. (2020). *Let us dream: The path to a better future. Pope Francis in conversation with Austen Ivereigh*. London: Simon and Schuster.
- Jambrek, S. (2019). Church models for the 21st century. *Kairos: Evangelical Journal of Theology*, 13(1), 37–91. <https://doi.org/10.32862/k.13.1.2>.
- Kamahi, U. (2017). Teori kekuasaan Michael Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Al-Khitabah*, 3(1), 117–133. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926>.
- Kebung, K. (2018). Membaca ‘kuasa’ Michel Foucault dalam konteks ‘kekuasaan’ di Indonesia. *MELINTAS*, 33(1), 34–51. <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>.
- Koentjaraningrat. (1969). *Rintangan-rintangan mental dalam pembangunan ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Bharata.
- Koopman, C. (2017, Maret 15). *Why Foucault’s work on power is more important than ever*. Diambil 27 Oktober 2023, dari Aeon website: <https://aeon.co/essays/why-foucaults-work-on-power-is-more-important-than-ever>.
- Leonardo, M. J. C. G. de. (2021). Engraving and religious imagery in the modern age: Between verisimilitude and the suggestion of non-existent realities. Analysis of some cases elaborated in Spain. *Religions*, 12(1096), 1–29. <https://doi.org/10.3390/rel12121096>.
- Loyola, St. I. (1993). *Latihan rohani* (J. Darminta, Penerj.). Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (1984). *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Moons, J. (2022). A comprehensive introduction to synodality: Reconfiguring ecclesiology and ecclesial practice. *Roczniki Teologiczne*, 69(2), 73–93. <https://doi.org/10.18290/rt22692.5>.
- Mulder, N. (1978). *Mysticism and everyday life in contemporary Java; Cultural persistence and change*. Singapore: Singapore University Press.
- Murphy, F. (2020). Roman Catholic ecclesiology: From Vatican II to today. Dalam K. J. Bender & D. S. Long (Ed.), *T&T Clark handbook of ecclesiology* (hlm. 107–127). New York: T&T Clark.

- O'Malley, J. W., & O'Brien, T. W. (2020). The twentieth-century construction of Ignatian spirituality: A sketch. *Studies in the Spirituality of Jesuits*, 52(3). <https://doi.org/10.6017/ssj.v52i3.12953>.
- Pidel, A. (2022). Ignatius Loyola's "hierarchical church" as Dionysian reform program. *Theological Studies*, 83(4), 554–578. <https://doi.org/10.1177/00405639221127267>.
- Pomplun, T. (2020). Roman Catholic ecclesiology: From the medieval period to Vatican I. Dalam K. J. Bender & D. S. Long (Ed.), *T&T Clark handbook of ecclesiology* (hlm. 96–106). New York: T&T Clark.
- Puspitasari, G., Misyuraidah, Fauzi, M., & Syarnubi. (2019). Pembinaan keagamaan peserta didik Muslim oleh guru pendidikan agama Islam (PAI) di yayasan Khatolik. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 1(4), 497–508. <https://doi.org/10.19109/pairf.v1i4.3595>.
- Sutrianti, N. K. (2019). Pengelolaan pendidikan keagamaan Hindu di Yayasan Pasraman Gurukula Bangli provinsi Bali. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 2(2), 41–53. <https://doi.org/10.33363/swjsa.v2i2.351>.
- Tim Peneliti Universitas Sanata Dharma. (2016). *Laporan penelitian perkembangan sekolah-Sekolah di Yayasan Kanisius*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, Asosiasi Sekolah Jesuit Indonesia, dan Yayasan Kanisius.